

Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Labuhan Batu

Sahala Purba¹ Eloy Charolina Hutabarat² Romaito Simbolon³ Ary Dratma Simarmata⁴
Ekel Gia Surbakti⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Methodist Indonesia
^{1,2,3,4,5} sahala824@gmail.com, eloihutabarat@gmail.com, romaasimbolon@gmail.com,
arysimarmata0@gmail.com, ekelsurbakti0852@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to evaluate the financial performance of the Labuhan Batu district government based on financial report data from 2013 to 2022. In this study, the approach used is descriptive research with a background in phenomena such as unemployment rates and poverty rates in Labuhan Batu district from 2013 to 2022. The results of the analysis from 2013 to 2022 show that the financial performance of Labuhan Batu district is seen from: (1) the regional financial independence ratio is still very low because the average ratio is 22.57% with an instructive relationship pattern that illustrates that the level of community welfare is very low (2) The regional financial dependency ratio is relatively low because the average is 12.12%, so the level of dependence of the regional government on central and/or provincial government revenues is relatively low (3) The ratio of the degree of fiscal decentralization is relatively low with an average of 12.12% (4) The ratio of the effectiveness of regional original income is relatively less effective because the average effectiveness is still below 100%, namely 83.17% (5) The ratio of the efficiency of regional original income can be said to be inefficient because the average is 83.17%, so the performance of the regional government can be said to be inefficient in Labuhan Batu district (6) The regional tax effectiveness ratio is classified as less effective because it has an average of 79.87% (7) The regional tax efficiency ratio is classified as very efficient in collecting regional taxes with an average of 3.79%, so the collection of regional taxes in Labuhan Batu is increasingly efficient (8) The BUMD contribution ratio is classified as contributing very low with average 9.04%

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten labuhan batu berdasarkan data laporan keuangan tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan dilatar belakangi oleh fenomena seperti tingkat pengangguran dan angka kemiskinan di kabupaten labuhan batu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Hasil analisis pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa kinerja keuangan kabupaten labuhan batu dilihat dari: (1) rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah sekali karena rata-rata rasio ini sebesar 22,57% dengan pola hubungan yang instruktif menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat tergolong rendah sekali (2) Rasio ketergantungan keuangan daerah tergolong rendah karena rata-rata sebesar 12,12% maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan atau pemerintah provinsi tergolong rendah (3) Rasio derajat desentralisasi fiskal tergolong kurang dengan rata-rata 12,12% (4) Rasio efektifitas pendapatan asli daerah tergolong kurang efektif karena rata-rata efektifitasnya masih dibawah 100% yaitu 83,17% (5) Rasio efisiensi pendapatan asli daerah dapat dikatakan tidak efisien karena rata-rata sebesar 83,17% maka kinerja pemerintah daerah bisa dikatakan tidak efisien di kabupaten labuhan batu (6) Rasio efektifitas pajak daerah tergolong kurang efektif karena memiliki rata-rata 79,87% (7) Rasio efisiensi pajak daerah tergolong sangat efisien dalam melakukan pengumpulan pajak daerah dengan rata-rata 3,79% maka pemungutan pajak daerah labuhan batu semakin efisien (8) Rasio derajat kontribusi BUMD tergolong berkontribusi rendah sekali dengan rata-rata 9,04%.

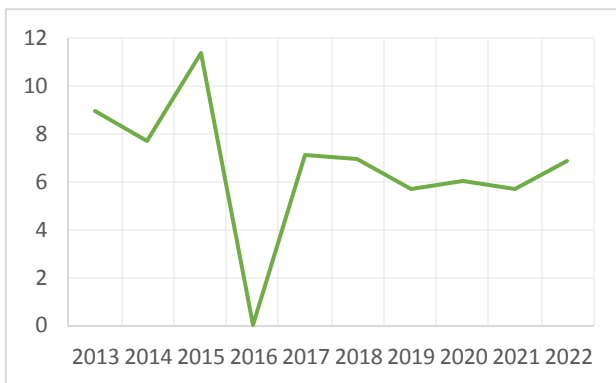
Kata kunci: *Analisis Laporan Keuangan, Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu*

1. PENDAHULUAN

Pernyataan tujuan penelitian kabupaten labuhan batu ini adalah Untuk menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan pemerintah dan komponennya, mengidentifikasi dan mengintegrasikan informasi keuangan yang terdapat

dalam laporan keuangan, menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah berdasarkan informasi dalam laporan keuangan. Saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kesenjangan antara potensi ekonomi asli daerah dengan target PAD yang ditetapkan setiap tahun

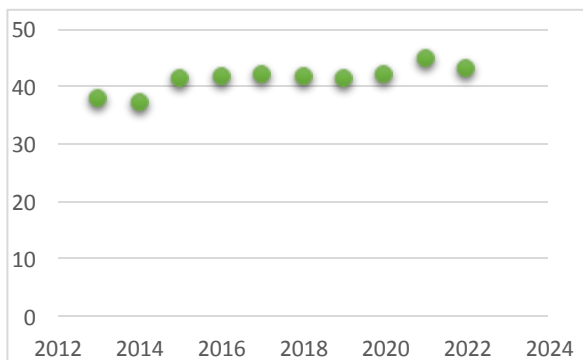
anggaran. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah, mencerminkan desentralisasi dan potensi lokal. Dan, penurunan PAD juga memiliki dampak terhadap tingkat pengangguran di Labuhan Batu. Penurunan PAD dapat menyebabkan keterbatasan dalam penyediaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi lokal, sehingga berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran. Sebaliknya, peningkatan PAD seharusnya mendukung program-program pengembangan ekonomi yang bisa mengurangi tingkat pengangguran di daerah Labuhan Batu. Perubahan kebijakan dapat mempengaruhi efisiensi pengumpulan PAD. Pengelolaan yang kurang efektif dapat menyebabkan rendahnya realisasi PAD (Nurul Arbila, Yani Rizal, 2022)



Sumber: (BPS Kabupaten Labuhan Batu, 2024b)

Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Labuhan batu tahun 2013-2022

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Gambar di atas ini menunjukkan perbandingan TPT kabupaten Labuhan Batu dari tahun 2013-2022. Dimana TPT paling tinggi terjadi pada tahun 2015 sedangkan TPT paling rendah terjadi pada tahun 2021.



Sumber: (BPS Kabupaten Labuhan Batu, 2024c)

Gambar 2. Tingkat Kemiskinan Kabupaten

Labuhan Batu 2013-2022.

Gambar di atas menunjukkan perbandingan jumlah penduduk miskin di kabupaten Labuhan Batu dari tahun 2013-2022. Dimana tingkat kemiskinan Kabupaten Labuhan Batu paling tinggi terjadi pada tahun 2021, sedangkan tingkat kemiskinan Kabupaten Labuhan Batu paling rendah terjadi pada tahun 2014. Kemiskinan umum terjadi di berbagai daerah akibat kelangkaan kebutuhan dasar, kurangnya sumber daya, dan sulitnya akses pendidikan serta pekerjaan. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerah-daerah. Penurunan PAD dapat menghambat program-program pengentasan kemiskinan dan penyediaan layanan social, sehingga berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, peningkatan PAD dapat mendukung upaya-upaya pengembangan ekonomi dan kesejahteraan social bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Fluktuasi PAD menunjukkan tantangan dalam mencapai kestabilan ekonomi dan sosial, yang berdampak langsung pada kondisi kemiskinan di Labuhan Batu (Azmi, 2019).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri penyelenggaraan kegiatan dan urusan dalam Pemerintahannya (Runjung et al., 2022). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat diketahui dengan cara berikut ini:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Total PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan bisa menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga ketergantungan keuangan terhadap Pemerintah Pusat bisa berkurang. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap penerimaan

Pusat dan/atau Pemerintah Propinsi (Anggi, 2022). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi merupakan rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD yang diukur dengan membandingkan antara total PAD dengan total pendapatan Daerah (Marlianita & Saleh, 2020). Rasio derajat desentralisasi dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efektifitas PAD

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Melmambessy, 2022).

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi PAD

Bahwa untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah dalam mobilisasi penerimaan PAD, indikator Rasio Efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari Rasio Efektifitasnya sudah baik bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung Rasio Efisiensi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan Realisasi Penerimaan PAD dengan anggaran PAD (Anggi, 2022). Rasio Efisiensi dapat dihitung dengan formulasi berikut ini :

$$\text{Rasio Keefisienan PAD} = \frac{\text{Biaya Perolehan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektifitas Pajak Daerah

Efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak (Puspitasari

& Rohman, 2014). Efektivitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus efektifitas pajak daerah berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Efisiensi pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase biaya pemungutan pajak dibagi realisasi penerimaan pajak daerah (Puspitasari & Rohman, 2014). Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan rasio efisiensi pajak daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak}} \times 100\%$$

Rasio derajat kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Sudarnan, 2022).

$$\text{Rasio derajat kontribusi BUMD} = \frac{\text{Laba BUMD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

3. METODOLOGI

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dalam hal ini, penulis mencoba mengumpulkan data dan mengkaji fakta-fakta yang terkait kemudian menguraikan dan menjelaskan masalah kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu. Sumber data dari penelitian ini adalah Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu yang telah di audit BPK Sumatera Utara dengan tahun pengamatan 10 tahun yaitu mulai tahun 2013 sampai 2022. Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan 8 rasio laporan keuangan.

Aldapun parameter yang menjadi acuan atau tolak ukur dalam melakukan analisis laporan keuangan ini adalah :

Rasio kemandirian keuangan daerah

Tingkatan	Keterangan	Pola Hubungan
0-25%	Rendah sekali	Instruktif
>25-50%	Rendah	Konsultatif
>50-75%	Sedang	Partisipatif
>75-100%	Tinggi	Delegatif

Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi (Suparyanto, 2020).

Rasio ketergantungan keuangan daerah

Tingkatan	Keterangan
0-10%	Sangat rendah
10-20%	Rendah
20-30%	Sedang
30-40%	Cukup
40-50%	Tinggi
>50%	Sangat tinggi

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi (Jikwa et al., 2015).

Rasio derajat desentralisasi fiskal

Tingkatan	Keterangan
0-10%	Sangat kurang
10-20%	Kurang
20-30%	Sedang
30-40%	Cukup
40-50%	Baik
>50%	Sangat baik

Semakin tinggi kontribusi dari PAID maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (Nasution, 2022).

Tingkat keefektifan PAID

Tingkatan	Keterangan
>100	Sangat efektif
100	Efektif
90-99	Cukup efektif
75-89	Kurang efektif
<75	Tidak efektif

Tingkat keefektifan PAID digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Kosmas & Wendy, 2022)

Tingkat keefisienan PAID

Tingkatan	Keterangan
<10%	Sangat efisien
10-20%	Efisien
21-30%	Cukup efisien
31-40%	Kurang efisien
>40%	Tidak efisien

Kinerja pemerintah akan semakin efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio keefisienan PAID berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Polii et al., 2020)

Tingkat keefektifan fiskal daerah

Tingkatan	Keterangan
>100	Sangat efektif
100	Efektif
90-99	Cukup efektif
75-89	Kurang efektif
<75	Tidak efektif

Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Lohonauman, 2016)

Tingkat keefisienan fiskal daerah

Tingkatan	Keterangan
<10%	Sangat efisien
10-20%	Efisien
21-30%	Cukup efisien
31-40%	Kurang efisien
>40%	Tidak efisien

Diketahui bahwa jika semakin rendah nilai rasio efisiensi maka akan semakin efisien pemungutan pajak daerah (Riomata Panawan & Kitta, 2023).

Kriteria tingkat derajat kontribusi BUMD

Tingkatan	Keterangan
<0%	Tidak Berkontribusi
0-10%	Berkontribusi Rendah Sekali
10-30%	Berkontribusi Rendah
31-40%	Cukup Berkontribusi
41-50%	Berkontribusi Tinggi
>50%	Berkontribusi Sangat Tinggi

Rasio derajat kontribusi BUMD digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung penerimaan pendapatan daerah (Rahmawati, 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten labuhan batu tahun 2013-2022 cenderung

mengalami peningkatan. Dengan nilai rasio kemandirian keuangan daerah paling rendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,95% dan nilai rasio tertinggi pada tahun 2021 sebesar 99,37%. Sementara itu, pada tahun 2022 terjadi penurunan nilai rasio kemandirian yang cukup signifikan yaitu dari 99,37% menjadi 17,47% atau terjadi penurunan

sebesar 81,9%. Meskipun nilai rasio kemandirian selalu mengalami peningkatan, namun rata-rata nilai rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Labuhan Batu masih dalam kategori rendah.

Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi PAID	Pendapatan Transfer	Rasio (%)	Keterangan	Pola Hubungan
2013	49.784.550.240,34	716.233.421.608,00	6,95%	Rendah sekali	Instruktif
2014	109.896.912.458,24	788.864.385.160,00	13,93%	Rendah sekali	Instruktif
2015	101.023.216.258,96	889.613.886.402,00	11,35%	Rendah sekali	Instruktif
2016	125.925.267.724,39	1.101.828.321.787,00	11,42%	Rendah sekali	Instruktif
2017	124.674.017.375,34	976.588.696.731,00	12,76%	Rendah sekali	Instruktif
2018	162.794.472.016,74	988.005.911.794,00	16,47%	Rendah sekali	Instruktif
2019	175.335.685.316,71	1.012.228.495.149,00	17,32%	Rendah sekali	Instruktif
2020	161.486.609.119,15	866.368.570.365,00	18,63%	Rendah sekali	Instruktif
2021	238.194.215.393,75	239.690.323.904,00	99,37%	Tinggi	delegatif
2022	184.403.843.981,87	1.055.080.539.114,00	17,47%	Rendah sekali	Instruktif
Rata-rata	143.351.878.988,55	863.450.255.201,40	22,57%	Rendah sekali	Instruktif

Sumber: Hasil olahan dari Informasi Laporan Keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Labuhan Batu tahun 2013-2022 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Dengan nilai

rasio ketergantungan keuangan daerah paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 17,74% dan nilai rasio terendah pada tahun 2013 sebesar 6,01%.

Tabel 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Total PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio (%)	Keterangan
2013	49.784.550.240,34	827.442.717.848,34	6,01%	Sangat rendah
2014	109.896.912.458,24	927.684.589.363,24	11,84%	Rendah
2015	101.023.216.258,96	1.013.045.067.460,96	9,97%	Sangat rendah
2016	125.925.267.724,39	1.277.272.191.263,39	9,85%	Sangat rendah
2017	124.674.017.375,34	1.164.296.889.256,34	10,70%	Rendah
2018	162.794.472.016,74	1.221.119.537.810,74	13,33%	Rendah
2019	175.335.685.316,71	1.318.715.109.320,71	13,29%	Rendah
2020	161.486.609.119,15	1.177.755.366.136,15	13,71%	Rendah
2021	238.194.215.393,75	1.342.106.703.518,75	17,74%	Rendah
2022	184.403.843.981,87	1.251.239.536.921,87	14,73%	Rendah
Rata-rata	143.351.878.988,55	1.152.067.770.890,05	12,12%	Rendah

Sumber: Hasil olahan dari Informasi Laporan Keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Labuhan Batu tahun 2013-2022 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan nilai rasio derajat desentralisasi fiskal paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 17,74%

dan nilai rasio terendah pada tahun 2013 sebesar 6,01%. Pada tahun 2022 rasio derajat desentralisasi fiskal mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 17,74% menjadi 14,73% atau terjadi penurunan sebesar 3,01% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun nilai rasio derajat desentralisasi fiskal tahun 2022 mengalami

JURNAL MANEKSI VOL ..., NO. ..., BULAN TAHUN

penurunan yang cukup signifikan, akan tetapi rata-rata nilai rasio derajat desentralisasi fiskal daerah

Kabupaten labuhan batu masih dalam kategori cukup.

Tabel 3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun	Total PAID	Total Pendapatan Daerah	Rasio (%)	Keterangan
2013	49.784.550.240,34	827.442.717.848,34	6,01%	Sangat kurang
2014	109.896.912.458,24	927.684.589.363,24	11,84%	Kurang
2015	101.023.216.258,96	1.013.045.067.460,96	9,97%	Sangat kurang
2016	125.925.267.724,39	1.277.272.191.263,39	9,85%	Sangat kurang
2017	124.674.017.375,34	1.164.296.889.256,34	10,70%	Kurang
2018	162.794.472.016,74	1.221.119.537.810,74	13,33%	Kurang
2019	175.335.685.316,71	1.318.715.109.320,71	13,29%	Kurang
2020	161.486.609.119,15	1.177.755.366.136,15	13,71%	Kurang
2021	238.194.215.393,75	1.342.106.703.518,75	17,74%	Kurang
2022	184.403.843.981,87	1.251.239.536.921,87	14,73%	Kurang
Rata-rata	143.351.878.988,55	1.152.067.770.890,05	12,12%	Kurang

Sumber: Hasil olahan dari Informasi Laporan Keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

Rasio Efektivitas PAID

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio efektivitas PAID Kabupaten Labuhan Batu tahun 2013-2022 cukup fluktuatif. Nilai Rasio Efektivitas PAID paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 102,44% dan nilai rasio terendah pada tahun 2015 sebesar 67,45%. Rasio efektivitas PAID

mengalami beberapa kali penurunan, yaitu pada tahun 2025 sebesar 67,45%. Rasio efektivitas PAID juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2014 dan tahun 2021, yaitu sebesar 102,44% dan 99,37%. Meskipun nilai efektivitas PAID cukup fluktuatif, akan tetapi rata-rata nilai rasio efektivitas PAID Kabupaten labuhan batu masuk dalam kategori sangat efektif.

Tabel 4. Rasio Efektivitas PAID

Tahun	Realisasi PAID	Anggaran PAID	Rasio (%)	Keterangan
2013	49.784.550.240,34	66.556.542.461,00	74,80%	Tidak efektif
2014	109.896.912.458,24	107.270.501.235,00	102,44%	Sangat efektif
2015	101.023.216.258,96	149.770.925.954,00	67,45%	Tidak efektif
2016	125.925.267.724,39	137.749.336.573,00	91,41%	Cukup efektif
2017	124.674.017.375,34	164.478.008.083,00	75,79%	Kurang efektif
2018	162.794.472.016,74	180.542.687.295,00	90,16%	Cukup efektif
2019	175.335.685.316,71	240.318.936.755,00	72,95%	Tidak efektif
2020	161.486.609.119,15	225.869.464.200,00	71,49%	Tidak efektif
2021	238.194.215.393,75	239.690.323.904,00	99,37%	Cukup efektif
2022	184.403.843.981,87	214.870.699.556,00	85,82%	Kurang efektif
Rata-rata	143.351.878.988,55	172.711.742.601,60	83,17%	Kurang efektif

Sumber: Hasil olahan dari Informasi Laporan Keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

Rasio Efisien PAID

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio efisiensi PAID Kabupaten labuhan batu tahun 2013-2022 cukup fluktuatif. Nilai Rasio efisiensi PAID paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu

sebesar 102,44% dan nilai rasio terendah pada tahun 2015 sebesar 67,45%. Meskipun nilai efisiensi PAID cukup fluktuatif, akan tetapi rata-rata nilai rasio efisiensi PAID Kabupaten labuhan batu masuk dalam kategori sangat efisien.

Tabel 5. Efisiensi PAID

Tahun	Biaya perolehan PAID	Realisasi PAID	Rasio (%)	Keterangan
2013	2.439.265.280,00	49.784.550.240,34	4,89%	Sangat efisien
2014	2.007.323.626,00	109.896.912.458,24	1,82%	Sangat efisien
2015	579.995.000,00	101.023.216.258,96	0,57%	Sangat efisien
2016	1.325.689.978,00	125.925.267.724,39	1,05%	Sangat efisien
2017	1.456.944.039,00	124.674.017.375,34	1,16%	Sangat efisien
2018	1.526.986.991,00	162.794.472.016,74	0,93%	Sangat efisien
2019	1.596.189.003,00	175.335.685.316,71	0,91%	Sangat efisien
2020	1.710.868.765,00	161.486.609.119,15	1,05%	Sangat efisien
2021	601.235.378,00	238.194.215.393,75	0,25%	Sangat efisien
2022	355.493.680,00	184.403.843.981,87	0,19%	Sangat efisien
Rata-rata	1.359.999.174,00	143.351.878.988,55	1,29%	Sangat efisien

Sumber: Hasil olahan dari Informasi Laporan Keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Labuhan Batu tahun 2013-2022 cukup fluktuatif dengan adanya beberapa peningkatan dan penurunan setiap tahun. Nilai rasio efektivitas pajak daerah paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 133,27%

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai rasio terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 37,73%. Rasio efektivitas pajak daerah kabupaten Labuhan Batu juga mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 100,63%. Lalu pada tahun 2014 terjadi penurunan nilai rasio efektivitas pajak daerah menjadi 81,57%. Meskipun nilai efektivitas pajak daerah cukup fluktuatif, akan tetapi rata-rata nilai rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Labuhan Batu masih dalam kategori sangat efektif.

Tabel 6. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Pajak Daerah	Rasio (%)	Keterangan
2013	28.479.806.865,00	21.369.600.000,00	133,27%	Sangat efektif
2014	36.532.255.329,00	44.785.167.000,00	81,57%	Kurang efektif
2015	23.659.001.346,50	62.700.000.000,00	37,73%	Tidak efektif
2016	29.310.355.047,50	40.747.889.855,00	71,93%	Tidak efektif
2017	34.078.320.116,00	49.550.000.000,00	68,77%	Tidak efektif
2018	39.052.031.654,84	49.550.000.000,00	78,81%	Kurang efektif
2019	46.162.440.064,92	52.550.000.000,00	87,84%	Kurang efektif
2020	41.544.340.012,28	57.700.000.000,00	72,00%	Tidak efektif
2021	114.555.278.697,00	113.830.121.950,00	100,63%	Efektif
2022	58.160.437.656,00	87.922.715.306,00	66,14%	Tidak efektif
Rata-rata	45.153.426.678,90	58.070.549.411,10	79,87%	Kurang efektif

Sumber: Hasil olahan dari Informasi Laporan Keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio efisiensi pajak daerah Kabupaten Labuhan Batu tahun 2013-2022 cukup fluktuatif dengan adanya beberapa peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Nilai rasio efisiensi pajak daerah paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,56% atau menggambarkan tingkat efisiensi yang paling rendah dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya. Nilai rasio efisiensi pajak daerah terendah pada tahun 2021 sebesar 0,52% atau memiliki tingkat efisiensi paling tinggi. Nilai rasio efisiensi pajak daerah selalu mengalami peningkatan, hal ini berarti tingkat efisiensi pajak daerah tahun 2013-2022 selalu mengalami penurunan. Meskipun nilai rasio efisiensi pajak daerah selalu mengalami kenaikan, akan tetapi tingkat efisiensi pajak daerah Kabupaten Labuhan Batu masuk dalam kategori sangat efisien.

Tabel 7. Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Ralisasi Pajak Daerah	Rasio (%)	Keterangan
2013	2.439.265.280,00	28.479.806.865,00	8,56%	Sangat efisien
2014	2.007.323.626,00	36.532.255.329,00	5,49%	Sangat efisien
2015	579.995.000,00	23.659.001.346,50	2,45%	Sangat efisien
2016	1.325.689.978,00	29.310.355.047,50	4,52%	Sangat efisien
2017	1.456.944.039,00	34.078.320.116,00	4,27%	Sangat efisien
2018	1.526.986.991,00	39.052.031.654,84	3,91%	Sangat efisien
2019	1.596.189.003,00	46.162.440.064,92	3,45%	Sangat efisien
2020	1.710.868.765,00	41.544.340.012,28	4,11%	Sangat efisien
2021	601.235.378,00	114.555.278.697,00	0,52%	Sangat efisien
2022	355.493.680,00	58.160.437.656,00	0,61%	Sangat efisien
Rata-rata	1.359.999.174,00	45.153.426.678,90	3,79%	Sangat efisien

Sumber: Hasil olahan dari Informasi Laporan Keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

Rasio Derajat Kontribusi BUMD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio derajat kontribusi BUMD Kabupaten labuhan batu tahun 2013-2022 cenderung mengalami penurunan. Sementara rasio derajat kontribusi BUMD pada tahun 2013 mengalami kenaikan yaitu

sebesar 22,09% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio derajat kontribusi BUMD paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 22,09% dan paling rendah pada tahun 2021 sebesar 5,09%. Rasio derajat kontribusi BUMD kabupaten labuhan batu tahun 2013-2022 dapat dikatakan rendah sekali.

Tabel 8. Rasio Derajat Kontribusi BUMD

Tahun	Labai BUMD	Realisasi PAID	Rasio (%)	Keterangan
2013	11.001.693.091,00	49.784.550.240,34	22,09%	Berkontribusi Rendah
2014	6.713.719.683,00	109.896.912.458,24	6,10%	Berkontribusi Rendah Sekali
2015	10.759.754.776,00	101.023.216.258,96	10,65%	Berkontribusi Rendah
2016	13.322.266.984,00	125.925.267.724,39	10,57%	Berkontribusi Rendah
2017	11.988.317.788,00	124.674.017.375,34	9,61%	Berkontribusi Rendah Sekali
2018	8.725.188.771,00	162.794.472.016,74	5,35%	Berkontribusi Rendah Sekali
2019	16.226.589.877,00	175.335.685.316,71	9,25%	Berkontribusi Rendah Sekali
2020	8.242.333.014,00	161.486.609.119,15	5,10%	Berkontribusi Rendah Sekali
2021	12.136.721.336,00	238.194.215.393,75	5,09%	Berkontribusi Rendah Sekali
2022	12.160.484.250,00	184.403.843.981,87	6,59%	Berkontribusi Rendah Sekali
Rata-rata	11.127.706.957,00	143.351.878.988,55	9,04%	Berkontribusi Rendah Sekali

Sumber: Hasil olahan dari Informasi Laporan Keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kabupaten labuhan batu mempunyai potensi untuk meningkatkan kabupatennya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah kabupaten labuhan batu perlu meningkatkan kualitas dan kinerja keuangan dalam pengelolaan pendapatan daerah agar lebih efektif kedepannya. Salah satu cara pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatannya adalah dengan memperkuat proses penyusunan peraturan daerah dan menyesuaikan besaran retribusi sesuai dengan perkembangan perekonomian. Dalam meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah daerah kabupaten labuhan batu perlu meningkatkan

administrasi data dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sistem yang dapat mendeteksi wajib pajak yang tidak patuh. Sosialisasi perpajakan melalui media online juga perlu dilakukan sesuai dengan tren terkini untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pemerintah daerah labuhan batu juga harus mencari alternatif lain yang lebih efisien dalam pengumpulan pajak untuk meminimalkan biaya perolehan. Pemerintah juga harus memperkuat peran kepala desa sebagai pemimpin dan aktor kunci dalam menyebarkan informasi pembangunan. Pembangunan jaringan komunikasi yang efektif juga sangat penting, dengan fokus pada bahan diskusi terkait informasi pembangunan yang substansial dan inovatif.

5.2. Saran

Saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu teruntuk Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan retribusi daerah dengan memperkuat proses pemungutan seperti mempercepat penyusunan Perda dan mengubah tarif retribusi mengikuti perkembangan perekonomian (Siswanto & Maylani, 2022). Bagi kepala Dinas Pendapatan keuangan Daerah Kabupaten Labuhan Batu agar melakukan atau melaksanakan Anggaran sesuai dengan Keuangan Daerah Labuhan Batu. Bagi Pemerintah daerah, sebaiknya dalam menyusun dan merealisasikan APBD perlu memperhatikan rasio-rasio keuangan untuk periode berikutnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya melalui optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Meneliti variabel-variabel atau faktor-faktor yang dapat menjelaskan atau mempengaruhi kemandirian daerah, misalnya pinjaman daerah dan investasi di daerah. Pemerintah Kabupaten Labuhan batu dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Pemerintah Kabupaten Labuhan batu pada tahun-tahun berikutnya harus terus meningkatkan kualitas dan kinerja keuangannya terutama dalam mengelola PAD agar Kabupaten Labuhan batu dapat menjadi kota yang lebih efektif dalam mengelola keuangan daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anggi, A. A. S. (2022). Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020. *Akuntansi Prima*, 4(1), 104–115. <https://doi.org/10.34012/japri.v4i1.2614>

Azmi, R. (2019). Pengaruh Jumlah Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan di Kaupaten Labuhan Batu. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 53(1), 1689–1699.

BPK. (2022). *Laporan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten labuhan batu tahun 2022*. 4(1), 9–15.

BPS Kabupaten Labuhan Batu. (2024a). *Penduduk Miskin (Ribu Jiwa), 2013-2022*. <https://labuhanbatukab.bps.go.id/indicator/23/60/1/penduduk-miskin.html>

BPS Kabupaten Labuhan Batu. (2024b). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen), 2013-2023*. <https://labuhanbatukab.bps.go.id/indicator/6/41/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt.html>

Efektivitas, A., Pajak, P., & Dan, D. (2023). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur. *Independent : Journal Of Economics E-ISSN : 2798-5008*, 3, 1–10.

Elim, I., Tinangon, J., & Kalalo, N. (2014). Pengukuran Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 606–616.

Jikwa, E., Salle, A., & Layuk, paulus k. allo. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura. *Jurnal Keuda Vol. 2 No. 3, 2(3)*, 1–17.

Kosmas, I., & Wendy. (2022). Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan Daerah dan Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang. *Proceeding Seminar Nasional Bisnis Seri VI, 2008*, 471–480.

Laksmi, S., & Supadmi, N. (2014). Efektivitas Pemungutan Pad Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(2), 515–524.

Lohonauman, I. L. (2016). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 172–180.

Maria. (2013). Analisis Rasio Kemandirian Dan Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. ((4)*, 36–45.

Marlianita, Y., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi , Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah , dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 25–35. <https://jurnal-akuntansi.polban.ac.id/>

Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 10–15. <https://doi.org/10.55049/jeb.v13i2.90>

Nasution, H. J. (2022). Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir. *Majalah Iptek Politeknik Negeri Medan Polimedia*, 24(3), 25–32. <https://doi.org/10.51510/polimedia.v24i3.451>

Nurul Arbila, Yani Rizal, I. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Labuhan Batu. *Optimal Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 240–249. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i4.741>

- Poli, I. R. A., Saerang, D. P. E., & Tangkuman, S. J. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 8(4), 781–788.
- Puspitasari, E., & Rohman, A. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4), 1–15.
- Rahmawati, D. N. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Eks-Karesidenan Madiun Tahun 2014-2018*.
- Riomata Panawan, A., & Kitta, S. (2023). Analisis Efektifitas, Efisiensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Jurnal Ezenza*, 2(April), 141–153. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/ej>
- Runjung, R. M. R. P. K., Primastuti, A., & Riswati. (2022). Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 9(2), 96–111.
- Siswanto, S., & Maylani, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 184–195. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>
- Sudarlan, R. F. dan R. D. M. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun 2014-2018. *Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print) ISSN 2722-9327 (Online)*, 18(2), 1–18.
- Suparyanto. (2020). *Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah (Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis)*. 5(3), 248–253.
- Trianto, A. (2013). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palembang*. 65–77.
- Tumija, & Sinta, G. (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 9(2), 61–78.
- Ullo, F., Stella Kakisina, C., & Sri Hartati, Y. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Manokwari. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 54–60. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i2.223>
- Yoduke, R., & Ayem, S. (2016). Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014. *Jurnal Akuntansi*, 3(2). <https://doi.org/10.24964/ja.v3i2.49>